

Da'wah Strategy Nahdlatul Ulama (NU) in Japanese Occupation Era

Siasat Dakwah Nahdlatul Ulama (NU) Era Penjajahan Jepang

Dinno Munfaizin Imamah

Pusat Studi Pengembangan Pesantren (PSPP) Jakarta

email: dino_csis@yahoo.com

Abstract : Nahdlatul Ulama (NU) provides colour in the independence movement in the Japanese colonial era. As an organization with the largest network up to the village level, NU put da'wah strategy to get the chance to build strength Islamic boarding School (pesantren) and clerics or Kyai for subsequent use against the occupation. In this case, NU does not put frontally opposite position, but chose against the Japanese policy of soft diplomacy that seeks to use the power of Islam for political and economic interests in the face of the West.

Abstraksi: Nahdlatul Ulama (NU) memberi warna dalam pergerakan kemerdekaan di era penjajahan Jepang. Sebagai organisasi dengan jaringan terbesar hingga tingkat desa, NU menempatkan siasat dakwah untuk mendapatkan kesempatan membangun kekuatan pesantren dan kyai untuk selanjutnya digunakan melawan penjajahan.

Dalam hal ini, NU tidak menempatkan posisi berlawanan secara frontal, melainkan memilih soft diplomacy melawan politik Jepang yang berusaha menggunakan kekuatan Islam untuk kepentingan politik dan ekonominya di hadapan Barat.

Keywords: *Fascism, colonialism, independence, Islam Indonesia*

A. Pendahuluan

Pada periode Januari hingga Maret 1942, negara-negara di Asia Tenggara yang menjadi jajahan Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat, mulai direbut dan diduduki tentara Jepang. Kondisi ini merupakan rangkaian upaya Jepang dalam merintis sebagai negara modern, sejak berlangsung Restorasi Meiji dari tahun 1867-1912.¹ Setelah menaklukan Belanda, Jepang segera membentuk pemerintahan militer, yang mana Jepang mulai menunjukkan kebijakan politik pro-Islam. Pada fase ini Jepang mulai membagi dan mengalihkan perhatiannya kepada kalangan Islam di Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan.

Jika merunut kebelakang, sikap condong Jepang kepada Islam bukan sesuatu yang baru. Seperti diungkapkan Harry J. Benda dan Aiko Kurasawa, pada tahun 1930-an, Jepang telah melakukan serangkaian penjajakan merangkul dunia Islam sebagai *partner* dalam menghadapi Barat. Meski dihadapkan pada kenyataan bahwa terlalu sedikit jumlah penduduk Jepang yang memeluk keyakinan Islam ini, namun mereka tidak surut bahkan bersemangat dalam menjalin hubungan dengan dunia Islam, termasuk Islam Indonesia.² Pada hari-hari pertama pendudukan tahun 1942-1945, Jepang menunjukkan sikap aktifnya guna meraih simpati kalangan Islam, salah satunya ketika seorang perwira Jepang turut hadir dalam penyelenggaraan Sholat Jum'at di sebuah masjid di Jakarta.³

Sebagai catatan, dalam paruh pertama abad ke-20 Jepang tampil sebagai kekuatan politik dan ekonomi baru dan menjadi satu-satunya

negara Asia yang berhasil menempatkan diri sejajar dengan negara-negara Barat. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuannya menjadi negara industri, sebuah label yang sebelumnya hanya tersemat pada negara-negara Barat. Tidak hanya pada aspek ekonomi dan industri saja, pada tahun-tahun selanjutnya Jepang juga mulai menunjukkan tipikalnya sebagai negara imperialis dari Asia. Padahal label seperti ini pada abad-abad sebelumnya identik dengan bangsa-bangsa Barat. Pada kelanjutannya, dengan pencapaian dan keberhasilannya di bidang industri serta munculnya tuntutan dan kebutuhan atas tersedianya bahan baku serta wilayah pasar, telah mendorong negara Jepang menampilkan diri sebagai negara ekspansionis-imperialis pada era 1930-an dan 1940-an.⁴

Puncak sikap ekspansionis mereka adalah ketika meletus Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik yang merupakan bagian dari Perang Dunia II yang pecah di Asia. Bermula dari serangan besar-besaran secara mendadak armada Angkatan Laut Jepang terhadap pangkalan militer AL Amerika Serikat di Pearl Harbour, Kepulauan Hawaii pada 8 Desember 1941,⁵ dalam kurun waktu yang sangat singkat pasukan Jepang dengan cepat dan mengagumkan menyebar serta merebut wilayah-wilayah strategis seperti Indochina, Muangthai (Thailand), Semenanjung Malaya (Malaysia), Birma (Myanmar), Singapura, Filipina, dan Indonesia (Hindia Belanda).

Kawasan Hindia Belanda (nama Indonesia masa itu) adalah wilayah paling akhir di Asia Pasifik yang diduduki Jepang pada masa awal meletusnya Perang Pasifik tersebut. Indonesia jatuh pada 8 Maret 1942 ketika pasukan Jepang berhasil menduduki pulau penting, Pulau Jawa, setelah pemerintah kolonial Hindia Belanda menyatakan menyerah tanpa syarat dalam kapitulasi yang ditandatangani di Kalijati, Subang, Jawa Barat.⁶ Ketika pecah Perang Pasifik yang dilanjutkan dengan pendudukan dan penguasaan Jepang terhadap Indonesia, idiologi Pergerakan Nasional di Indonesia telah berusia 33 tahun, dengan merunut kepada momentum berdirinya Boedi Oetomo (BO) pada 20 Mei 1908.⁷ Secara umum dapat dikatakan sebagian besar rakyat Indonesia dan

para tokoh politik di Indonesia pada masa itu cenderung menunjukkan sikap mendukung Jepang atau paling tidak bersimpati kepada Jepang.⁸ Pihak Indonesia terkondisikan berada dalam suatu ekspektasi bahwa ketika Jepang berhasil mengalahkan pasukan Hindia Belanda, maka mereka (Jepang) datang dengan status sebagai “pembebas” bagi bangsa Indonesia.

Aktivitas pergerakan nasional dari masa Kolonial Hindia Belanda hingga masa pendudukan Jepang ditandai dengan munculnya partai politik yang mengusung ideologi perjuangan masing-masing, kecuali Partai Komunis Indonesia.⁹ Secara umum partai-partai politik itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok partai Nasionalis dan kelompok partai yang mengusung ideologi agama (Islam). Selain itu juga terdapat organisasi massa yang tidak menyebut dirinya sebagai partai politik yang bersifat sekuler maupun Islam. Untuk menyebut contoh ormas Nahdlatul Ulama (NU).

Pada tahun pertama pendudukan, Jepang tidak membicarakan kemerdekaan dan lebih menunjukkan sifat aslinya sebagai ekspansionis dengan kebijakan-kebijakan kerasnya yang mengekang dan menekan seperti disinggung di depan. Keadaan seperti ini mewakili ungkapan bahwa kalangan pergerakan Indonesia telah terkecoh dengan propaganda perang yang dilakukan Jepang.¹⁰

Namun demikian, Jepang dihadapkan pada keterbatasan kemampuan mengendalikan wilayah – wilayah jajahan secara sendirian. Kenyataan ini membuat dukungan dari di wilayah yang diduduki menjadi kebutuhan. Jepang pun berupaya merangkul kalangan pergerakan di Indonesia dengan tujuan untuk mendukung kampanye perangnya. Meski Jepang juga sadar bahwa tindakan merangkul dan melibatkan kalangan pergerakan yang telah memiliki pengaruh luas di kalangan rakyat mengundang potensi yang merugikan. Karenanya ketika didirikan badan pendukung kampanye perang yaitu “Gerakan Tiga-A”, sosok yang dipercaya sebagai ketua bukan para tokoh populer seperti Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, atau yang lain.¹¹

Akibatnya dapat diduga, badan ini menunjukkan hasil yang tidak memuaskan sehingga Jepang berpikir ulang dan memutuskan untuk melibatkan para pemimpin yang populer di mata rakyat Indonesia. Gerakan Tiga-A dibubarkan, dan bulan Maret 1943 dibentuk PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) dan inilah masa Jepang memberi peran kepada empat tokoh, yaitu Sukarno, Mohammad Hatta, KH. Mas Mansyur, dan Ki Hajar Dewantoro untuk menempati posisi eksekutif dalam PUTERA.¹² Seperti yang selama ini menjadi kewaspadaan Jepang, bahwa melibatkan para tokoh-tokoh populis akan berpotensi kontra-produktif dengan kepentingan perang dan kedudukan mereka di Indonesia. Keberhasilan PUTERA dalam memobilisir dukungan rakyat menghadirkan rasa khawatir dan curiga Jepang. Karenanya kurang dari setahun sejak berdirinya, PUTERA pun dibubarkan untuk diganti dengan badan baru, *Jawa Hokokai* (Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa), yang lebih bisa diharapkan memberi jaminan terhadap kepentingan Jepang.¹³

Namun begitu pemahaman dan pengetahuan Jepang tentang Islam di Indonesia tampak belum utuh di awal pendudukannya itu. Kenyataan ini yang membuatnya sempat melakukan satu tindakan yang gegabah dengan menerapkan ketentuan *sheikerei* yang ditentang kalangan Islam. Selain itu Jepang juga melakukan kecerobohan ketika bertindak keras terhadap salah seorang ulama kharismatik NU KH. Hasyim Asy'ari,¹⁴ di mana jika tindakan tersebut tidak segera dikoreksi Jepang maka berpotensi besar pada lenyapnya dukungan Islam Indonesia terhadap kampanye Jepang.

Setelah serangkaian kesalahpahaman, posisi dan daya tawar NU mulai naik di hadapan Jepang, setelah sebelumnya secara prioritas mereka dikesampingkan dibandingkan dengan kalangan Nasionalis. Pada fase ini NU mengalami sebuah posisi yang belum pernah dialami sejak masa Kolonial Hindia Belanda, di mana penguasa (Jepang) memberikan kepercayaan kepada para tokoh dan pemimpin NU. Sementara itu di pihak Islam juga melakukan mobilisasi massa untuk mendukung kampanye Jepang sehingga dimulailah berbagai aktivitas

seperti penyelenggaraan pelatihan para kyai-kyai desa serta rekrutmen barisan sukarela dalam wadah Barisan Hizbullah. Terlihat bahwa peran dari para pemimpin NU, terutama kalangan Kyai pesantren sangat efektif untuk menggalang massa hingga ke wilayah pelosok sekalipun.

Selain itu dengan adanya sikap koreksi diri Jepang atas kesalahan mereka terhadap umat Islam sebelumnya juga ditunjukkan dengan kesediaan mereka memperbolehkan NU dan Muhammadiyah aktif kembali. Ini dapat diartikan bahwa ketentuan pelarangan mengadakan aktivitas dakwah di luar aktivitas untuk kepentingan Jepang menjadi tidak berlaku bagi dua organisasi Islam itu.

Pada sisi lain, ketika Jepang memberikan kepercayaan, ternyata kalangan Islam juga berhasil melakukan hal serupa dalam merealisasikan dukungan kampanye perang Jepang. Periode ini, yaitu kurun waktu Jepang berada dalam tabir kekalahan Perang Dunia II, memiliki ruang yang menarik untuk dikaji mengenai sejauh mana daya tawar politik kalangan NU saat Jepang mengharapakan dukungan. Terdapat banyak kejadian dan hal kesejarahan yang layak untuk diangkat dan dikaji lagi guna menambah khazanah pengetahuan sejarah bangsa, terutama yang terkait dengan NU, yaitu sisasat dakwahnya di era penjajahan Jepang.

B. Jepang Dan Dunia Islam

Relasi antara Jepang dengan umat Islam Indonesia bukan hal yang muncul secara tiba-tiba. Relasi keduanya telah terbangun beberapa tahun sebelum meletusnya Perang Pasifik, dimana Hindia Belanda telah dijadikan sebagai bagian dari rencana politik luar negeri Jepang. Pada masa-masa ini Islam menjadi bagian dalam propaganda Jepang seiring dengan munculnya gerakan Pan-Asia pada awal Abad ke-20. Secara umum Jepang mampu memahami dan memanfaatkan perasaan kolektif kalangan Islam Indonesia terkait dengan sikap mereka yang ditujukan kepada pemerintah Hindia Belanda pada masa sebelum meletus Perang Dunia II. Pengawasan ketat terhadap aktivitas politik, penolakan bekerja

sama dalam pemerintahan, dan sikap-sikap negatif Belanda di masa sebelumnya adalah hal-hal yang membuat pihak Indonesia memendam rasa kecewa.

Pada saat seperti ini jaringan intelijen Jepang mengamati secara langsung setiap perkembangan dan menyerap perasaan yang tumbuh. Semua diamati dengan cermat dimana para agen Jepang itu ikut membaaur dan berhubungan dengan masyarakat pribumi. Semua dalam skenario penjajahan bumi Indonesia. Setiap bangsa yang hendak melebarkan pengaruhnya terhadap bangsa lain pasti memiliki tujuan dan sebab tertentu yang menjadi dasar tindakannya itu. Tujuan dan sebab itu bisa karena alasan politik, ekonomi, dan sosial.

Demikian halnya pada bangsa Jepang ketika pada tahun 1930-an mulai menunjukkan watak agresifnya terhadap wilayah-wilayah di Asia. Tujuan Jepang melakukan hal itu karena ingin mewujudkan “Hakko Ikhu”, sebuah kewajiban suci menyatukan sudut-sudut dunia di bawah satu atap Kekaisaran Jepang.¹⁵ Selain berlatar belakang motif “Hakko Ikhu”, sikap itu juga didasari pernyataan Guchi Tanaka yang termaktub dalam “Tanaka Memorial” yang berisi tujuan dan rencana Kekaisaran Jepang.¹⁶

Jepang pun tumbuh menjadi modern dalam bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, sosial-budaya, dan militer. Karena itu memasuki Abad 20 Jepang menjelma menjadi negara maju baru. Jepang sadar atas muncul kolektivitas perasaan di Asia ini sehingga mereka berinisiatif menyebut dirinya sebagai pemimpin Asia dengan analog “saudara tua” yang akan membantu “saudara-saudara muda”-nya (bangsa Asia lain) sehingga muncul ideologi Pan Asia, suatu ideologi dan gerakan yang muncul di Asia dalam menghadapi hegemoni Barat.

Satu kawasan yang mendapat perhatian adalah Hindia Belanda (Indonesia), satu wilayah yang berlimpah bahan mentah dan minyak bumi yang dibutuhkan Jepang. Semula di tahun 1930-an Jepang melakukan hubungan ekonomi secara damai dengan pemerintah Hindia Belanda dan dalam waktu bersamaan juga memperluas kegiatannya di

kawasan ini.¹⁷ Intelijen Jepang berkamufase dengan beragam profesi biasa yang bisa mendekati dengan kaum pribumi seperti pedagang, montir, juru foto, dan lainnya. Mereka mengundang simpati pada saat rakyat memendam rasa benci kepada Belanda. Selain ramah, Jepang juga menawarkan produknya secara lebih murah.¹⁸ Selama melakukan misi intelijennya itu Jepang sadar bahwa umat Islam adalah mayoritas dan memiliki nilai strategis untuk mendukung rencana politiknya. Wajar jika mereka memiliki ketertarikan pada Islam, terlebih saat dunia Islam tersatukan dalam ideologi Pan-Islamisme.

Mengutip Aiko Kurasawa, kenyataan tentang sedikitnya pemeluk Islam di Jepang dan hampir tidak ada kemiripan antara ajaran Shinto dan Islam membuat awal relasi yang dibangun itu dirasakan “jauh” dan tidak akrab bagi Jepang.¹⁹ Namun keadaan ini tidak lantas membuat upaya mengenal dan merangkul Islam menjadi surut. Demi kepentingan politik, Jepang melakukan sesuatu yang harus dilakukannya untuk bisa lebih mendekati diri dengan Islam. Sementara Harry J. Benda mengatakan, “penemuan” Islam oleh Jepang dimulai pada 1920-an dan mereka mengapresiasi Islam jelas karena motif untuk mendapat dukungan terhadap rencana ekspansinya, terhadap kawasan Asia, meski di Jepang penganut Islam hanya berjumlah ratusan orang saja.²⁰

Langkah ini kemudian mendorong lahirnya studi Islam di Jepang, hingga pada tahun 1933 lahirlah propaganda yang menyatakan Jepang akan menjadi pelindung Islam. Pada tahun 1935 Jepang mengirim beberapa mahasiswanya ke Arab dan Mesir, dan mereka juga antusias mendatangkan para mahasiswa dan guru Islam dari Timur Tengah dan Asia ke Jepang.²¹ Upaya Jepang sampai pada implementasi yang bersifat fisik dengan mendirikan dua masjid, di Kobe tahun 1935 dan Tokyo di tahun 1938 dimana dalam pembukaan Masjid di Kobe itu pemerintah Jepang sengaja mengundang Pangeran Hussein dari Yaman agar bisa menarik perhatian dan empati dunia Islam.²²

Jepang semakin menarik dunia Islam ketika berdiri sebuah perserikatan Islam atau *Nippon Kaikyo Kyokai* pada bulan Mei 1938. Indikasi semakin

serius dan pentingnya organ itu dapat dilihat dalam susunan lembaga dimana posisi ketua dipegang Jenderal Senjuro Hayashi. Terlibatnya perwira tinggi militer mengindikasikan Jepang sangat serius dalam menggarap dukungan umat Islam karena saat itu pengaruh kelompok militeris di Jepang mulai menguat. Ini yang membuat badan tersebut dengan mudah dapat menggelar Pameran Islam di Tokyo dan Osaka pada September tahun itu.

Jepang sadar, segala hal yang berkaitan dengan Islam yang terjadi di Timur Tengah dan belahan dunia lain dipastikan mengundang perhatian Islam Indonesia (NU). Demikianlah, ketika negara ini menyelenggarakan Pameran Islam di Tokyo dan Osaka itu maka Islam Indonesia mendapat prioritas. Bahkan dalam pandangan Ahmad Mansur Suryanegara disebutkan, tujuan penyelenggaraan Pameran Islam itu sebenarnya lebih ditujukan kepada Islam Indonesia. Pihak Islam Indonesia melalui MIAI meresponsnya dengan mengirim delegasi yang terdiri Abdul Kahar Muzakir, KH. Farid Ma'ruf, KH. Mahfud Shiddiq, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Abdullah Al Muhdi.²³ Serangkaian aktivitas dari pertukaran mahasiswa, kajian Islam, pembangunan masjid, hingga ekspo Islam itu menurut Harry J. Benda bisa dibaca sebagai sebagian dari upaya pertama Jepang melakukan pemindahan pandangan umat Islam Indonesia yang semula berorientasi ke Timur Tengah ke Jepang.²⁴ Demikian halnya Senjuro Kobayashi dengan kedudukannya sebagai pimpinan *Nippon Kaikyo Kyokai* dan keberhasilannya menggelar serangkaian kegiatan itu membuatnya disebut sebagai "Bapak Islam Jepang".²⁵

Dalam kurun waktu tersebut kalangan Islam, terutama Islam tradisional yang terwakili melalui organ NU, mulai menunjukkan gejala pelibatan kedalam urusan politik, ditandai dengan semakin seringnya keluar pernyataan dan tuntutan dari organisasi ini terhadap ketidaksetujuan terhadap beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Kampanye Jepang pun mulai tidak tanggung-tanggung. Meski terdapat perbedaan jauh antara Islam dan Shinto yang

berpotensi menggagalkan Jepang menjadi pusat dunia Islam, namun untuk mendapat simpati, mereka menyatakan tentang kesamaan Islam dan Shinto.²⁶ Bahkan dengan berani mereka menyatakan, *Tenno Haika* (Kaisar Jepang) Hirohito akan memeluk Islam berikut gambaran tentang sesuatu yang gilang-gemilang mengenai pengaruh dan kekuasaan Islam yang berpusat di sekeliling Kaisar Khalifah Jepang Raya.²⁷ Jelas sekali jika propaganda ini mampu menyentuh, atau paling tidak mengundang perhatian kalangan Islam Indonesia.

C. NU di Hadapan Jepang

Sebagai sebuah faham dan gerakan yang mulai berpengaruh, pada kelanjutannya fasisme juga bersinggungan dengan kalangan agama dan berupaya melakukan upaya untuk menarik simpati kalangan agama untuk berada di pihaknya. Untuk itu kaum fasis berupaya untuk melakukan kerja sama serta berusaha menempatkan sesuatu dan simbol yang berkaitan dengan agama ke dalam pengaruhnya. Sebagaimana terlihat ketika Benito Mussolini mendekati pihak Gereja Vatikan dengan kesepakatan menandatangani Perjanjian Lateran pada bulan Februari 1929.²⁸ Demikian juga yang dilakukan Hitler yang memberikan tanda 'Palang Salib Baja' bagi para pasukannya yang telah menunjukkan prestasinya dalam medan tempur, atau juga seperti cara dari Fransisco Franco yang telah memanfaatkan orang-orang Katolik di Spanyol saat meletus perang sipil di negara tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa bagi kaum fasis agama menjadi alat penting untuk membantunya dalam mencapai tujuan.²⁹

Harun Yahya memberikan uraian mengenai relasi antara agama dengan fasisme, dimana disebutkan bahwa fasisme bermuka dua dalam menyikapi posisi agama. Dikatakannya:

*"Bagi fasisme, agama dijadikan sebagai alat ideologi untuk menyatukan rakyat karena mereka menyadari bahwa masyarakat cenderung bersedia melakukan segala bentuk pengorbanan atau apapun jika hal itu mengatasnamakan agama."*³⁰

Kaum fasis juga telah mengupayakan untuk menjadikan Islam sebagai bagian dari rencana untuk mewujudkan tujuannya seperti yang telah dilakukan kepada agama Kristen. Terkait dengan hal ini Ahmad Mansur Suryanegara menyatakan Jerman telah melakukan upaya dan propaganda untuk menarik Islam di kawasan Timur Tengah dengan melakukan tindakan yang diyakini akan menimbulkan simpati di kalangan Islam dengan cara melakukan pembinasaaan terhadap orang-orang Yahudi, yang selama ini menjadi musuh kaum Islam. Namun ia menyatakan upaya itu tidak berhasil karena hal seperti yang disebutkan:

“Bahwa Jerman gagal dalam pendekatan keagamaannya (untuk Islam di timur Tengah) karena mereka lebih menampilkan kekuatan militernya, daripada penghormatannya terhadap Islam. Oleh umat Islam pembinasaaan kaum Yahudi bukanlah dinilai sebagai upaya untuk membantu Islam, melainkan sekedar permasalahan rasial semata. Terlebih lagi pihak Sekutu telah berhasil menjadikan kalangan Islam untuk tidak berpihak kepada Poros Axis.”³¹

Kegagalan Jerman ini yang kemudian dijadikan pelajaran Jepang dalam menghadapi kalangan Islam Indonesia dalam rangka untuk menempatkannya sebagai pendukung terhadap rencana dan kampanye perangnya. Sikap yang empatik dan akomodatif kepada dunia Islam dan Islam di Indonesia secara umum dicoba dilakukan Jepang pada tahun-tahun sebelum pendudukan dan selama pendudukan, sehingga relatif pada masa-masa ini tidak berlangsung keadaan sebagaimana relasi antara Islam dengan pemerintah Hindia Belanda sebelumnya. Dalam kurun seminggu setelah pendudukannya terhadap kota Jakarta, para jamaah di Masjid Kwitang yang sedang melakukan shalat Jum’at dibuat terkejut dengan hadirnya perwira Jepang, Kolonel Horie, bersama perwira Jepang yang beragama Islam, Letkol Abdul Mun’im Inada.³² Dalam kesempatan ini Kolonel Horie berpidato yang meski kurang bisa dipahami oleh jamaah karena menggunakan bahasa Jepang, namun kejadian itu adalah cara pertama yang dilakukan oleh Jepang untuk memunculkan kesan dekat antara pihak Jepang dengan kaum Islam

Indonesia saat pertama kali mereka menjajakkan pendudukannya atas Pulau Jawa.

Entah apa yang ada di benak pihak Jepang dengan tindakan terhadap dua ulama kharismatik NU, *Hadratussyaiikh* KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Mahfudz Shiddiq. Pada bulan April 1942 itu Jepang menangkap dan memenjarakan keduanya selama 4 bulan dengan tuduhan mendalangi aksi perusakan pabrik gula milik Jepang di dekat Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.³³ Menurut Choirul Anam, alasan yang dituduhkan pihak Jepang atas penangkapan kedua kyai itu merupakan sesuatu yang mengada-ada. Kedua tokoh kharismatik itu ditangkap karena keduanya menyatakan penolakannya terhadap ketentuan "Saikere" yang diberlakukan Jepang. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dan ketika Saikere itu juga diharuskan untuk berlaku di lingkungan pesantren, KH. Hasyim Asy'ari tegas-tegas menolaknya dan menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk melakukan penolakan yang sama karena Saikere menurut Islam hukumnya haram.³⁴

Perlakuan Jepang itu dengan segera menuai reaksi jama'ah NU dan jika tidak diselesaikan maka berpotensi memunculkan konflik antara Jepang dengan kalangan Islam, terutama Islam tradisional. Jika ini terjadi maka apa yang sebelumnya dan akan dirintis Jepang dengan pelibatan kalangan Islam, jelas akan menemui kendala. Pada bulan Agustus 1942 masalah itu diselesaikan dengan membebaskan keduanya dari penjara.

Tampilnya Jepang sebagai penguasa baru pada awalnya dan secara umum mendapat sambutan dari pihak Indonesia. Ada sekian hal yang disandarkan Indonesia atas kehadiran Jepang ini seperti harapan tentang terwujudnya kawasan kemakmuran bersama, tentang bangkit dan terwujudnya kesadaran bersama sebagai bangsa Asia, hingga harapan tentang hadirnya kemerdekaan. Namun begitu kehadiran Jepang tidak melulu disikapi dengan keutuhan perasaan dan harapan yang positif terhadapnya. Pada sisi yang lain, Jepang pada masa awal pendudukannya malah membuat sebuah "blunder" yang membahayakan ketika mereka menangkap dan memenjarakan dua kyai kharismatik NU, KH. Hasyim

Asy'ari dan KH. Mahfudz Siddiq ke penjara dengan tuduhankeduanya telah mendalangi sebuah kerusuhan serta menghasut masyarakat untuk menentang Jepang.

Beberapa alasan utama yang perlu untuk dikemukakan mengapa Jepang sangat berkepentingan untuk mendapat dukungan dari Islam demi tujuan-tujuannya, terutama dukungan dari Islam tradisional dalam representasi organisasi Nahdlatul Ulama (NU), adalah faktor-faktor seperti:

1. Kebutuhan dukungan logistik pangan yang berasal dari lahan pertanian di desa-desa dimana para kyai dan ulama memiliki pengaruh;
2. Secara umum para kyai dan ulama desa bukan pimpinan partai politik;
3. Kuatnya solidaritas masyarakatdesa yang tidak terpengaruh westernisasi/Barat
4. Islam di pedesaan memiliki kultur perlawanan yang kuat dan lama terhadap penjajahan Belanda/Barat
5. Potensi wilayah pedesaan dan pelosok yang ideal untuk pertahanan.³⁵

D. Siasat Dakwah NU

Terkait dengan sikapnya terhadap pihak Islam Indonesia (NU), Negara Fessime Jepang sangat memperhitungkannya sebagaimana diwujudkan dalam satu prinsip dan sikap pemerintah militer dengan agama (Islam) sebagaimana diatur pada *Senryochi Gunsei Fissi Yoko* atau "Prinsip-prinsip mengenai pemerintahan Militer di wilayah pendudukan" yang dikeluarkan pada 14 Maret 1942. Di dalamnya dinyatakan bahwa, *"Agama-agama, sebagaimana kebiasaan yang ada dan berlaku, harus dihormati sejauh mungkin untuk menjaga kestabilan pikiran rakyat dan membuat mereka mau bekerja sama. Mengenai kaum Muslim, harus diberikan perhatian*

husus untuk memanfaatkan mereka dalam rangka mencengkeram pikiran rakyat."³⁶Pada kelanjutannya ketika Jepang mendapatkan kenyataan bahwa PUTERA telah berfungsi dari jauh yang menjadi harapan selama ini, maka mereka pun membentuk sebuah badan baru *Jawa Hokookai* atau Kebaktian Rakyat Jawa, dimana di dalamnya mulai menyertakan keterlibatan kalangan Islam, yang dalam hal ini adalah kalangan Islam dari kelompok NU, sebagai bagian yang penting dalam mencari dan mengharapakan dukungan selama melancarkan kampanye perangnya kepada pihak Sekutu.

1. Pembentukan Badan Urusan Agama (Shumubu)

Pada awal pembentukan pemerintahan, militer Jepang membentuk empat institusi setingkat departemen (*bu*) yaitu: *Somubu* (Departemen Urusan Umum), *Sangyobu* (Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan), *Kotsubu* (Departemen Perhubungan), dan *Zaimubu* (Departemen Keuangan). Pada perkembangannya dibentuk sebuah departemen lagi yakni *Shihobu* (Departemen Hukum dan Kehakiman).³⁷ Pada kelanjutannya untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan kalangan Islam, Jepang juga membentuk satu badan yang dinamakan *Shumubu* (Departemen Agama) dengan direktur pertamanya dijabat Kolonel Horie. Dengan demikian maka Shumubu menjadi lembaga yang aktif dan berarti juga cengkeraman politik Jepang terhadap kalangan Islam semakin meningkat pula.³⁸

Di sisi lain meski telah mengecewakan kalangan Islam, terutama kalangan ulama NU, Jepang tetap melakukan upaya-upaya yang diperlukan agar kekecewaan itu tidak semakin membesar. Untuk kesekian kalinya Jepang harus melakukan perubahan lagi terhadap badan *Shumubu* pada tahun 1944. Tindakan ini terjadi ketika pada bulan Februari 1944 meletus sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh seorang kyai pesantren pedesaan di Jawa Barat tepatnya di Singaparna, Tasikmalaya. Pemberontakan yang dipimpin KH. Zainal Mustafa itu jelas mengejutkan Jepang sekaligus memberi penyadaran kepada mereka

bahwa segala langkah dan kebijakan yang ditempuh terhadap rakyat dan kalangan Islam ternyata gagal.³⁹

Mundurinya Prof. Dr. Hussein Djayadingrat seperti menjadi babakan baru bagi kalangan Islam, terutama kalangan NU dalam hubungannya dengan lembaga Shumubu itu. Sosok kharismatik dari kalangan NU, KH. Hasyim Asy'ari yang pada bulan-bulan pertama pendudukan mendapat perlakuan kasar Jepang,⁴⁰ mendapatkan kepercayaan menempati jabatan kepala Shumubu itu pada 1 Agustus 1944.⁴¹ Dalam pandangan Harry J. Benda pengangkatan KH. Hasyim Asya'ari, yang saat itu juga sebagai Ketua Masyumi sebagai *Shumubu-co* (kepala Departemen Agama) disebutnya sebagai hanya meminjam nama saja karena secara *de facto* kyai kharismatik ini memang tidak pernah menempati kantor Shumubu di Jakarta dan lebih memilih untuk tetap tinggal di Jombang, Jawa Timur. Namun demikian J. Benda menyatakan bahwa persetujuannya untuk berlaku sebagai simbol itu adalah sama pentingnya dengan kenyataan bahwa puteranya KH. Wahid Hasyim menempati posisi yang penting dalam struktur Shumubu. Selain menempatkan KH. Wahid Hasyim, dalam pimpinan tinggi Shumubu ini juga menempatkan Abdul Kahar Muzakkir, sosok dari kalangan Islam modernis.⁴²

Penempatan KH. Hasyim Asy'ari sebagai *Shumubu-co* ini sempat memunculkan tanda tanya, apakah tindakan Jepang ini sebagai bentuk *over-compensatie* terhadap sikap kasar mereka yang pernah ditujukan kepada sosok kharismatik ini, atau memang mereka sebenarnya sudah muai menyadari tentang pengaruh dan kharisma dari kyai NU tersebut.⁴³ Dalam hal ini Kurasawa mengatakan bahwa pada saat itu situasi perang sudah semakin tidak menguntungkan bagi Jepang selain juga situasi sosial ekonomi yang semakin memburuk, sehingga dengan demikian kebutuhan untuk menggalang kerja sama dengan kalangan Islam (khususnya kalangan Islam) NU menjadi sesuatu yang sangat mendesak. Pengangkatan KH. Hasyim Asy'ari sebagai *Shumubu-co* merupakan satu konsesi Jepang kepada kekuatan-kekuatan Islam, dan Kurasawa

menegaskan bahwa pengangkatan tersebut bukan dipandang sebagai akibat simpati Jepang kepada kalangan Islam.⁴⁴

Namun yang jelas pengangkatan KH. Hasyim Asy'ari disambut dengan rasa bersemangat oleh kalangan Islam. Meski telah berusia cukup lanjut (69 tahun) dan tidak menempati kantornya di Jakarta dan lebih memilih tinggal di lingkungan pesantrennya di Jombang, bagi Jepang pengangkatan ini merupakan sesuatu yang sangat diperlukan guna mendapatkan kesempatan mengambil keuntungan dari pengaruh ulama kharismatik ini. Terkait dengan efektivitas pelaksanaan dari jabatan tingginya itu bisa ditengahi dengan keberadaan KH. Wahid Hasyim, sang putra, sebagai *sanyo* (setingkat wakil Shumubu-co) yang sebelumnya juga memegang jabatan-jabatan penting seperti Wakil Ketua Masyumi dan anggota dari *Chuo Sangi-in* (Dewan Pertimbangan Pusat) pemerintah militer Jepang.⁴⁵

Dari serangkaian perubahan-perubahan drastis dalam lembaga Shumubu ini mengandung arti mengenai pergeseran penting kebijakan pemerintah militer Jepang terhadap Islam. Hal ini diperkuat dengan sebuah laporan yang kemudian diserahkan kepada pasukan Sekutu setelah Jepang menyerah, bahwa setelah pengangkatan KH. Hasyim Asy'ari sebagai ketua Shumubu maka dengan segera Shumubu ini menjadi kantor politik kelas satu.⁴⁶

Nampaknya Jepang menetapkan bahwa Shumubu sebagai sebuah markas besar penting untuk operasi propaganda dan memberikan peran politik bagi para pejabatnya, dan untuk menyandang peran-peran yang demikian pada masanya maka tidak seorangpun yang cocok selain dipercayakan kepada para pemimpin agama/ulama. Ini berangkat dari kesadaran Jepang mengenai bagaimana menggalang kerja sama dengan penduduk pedesaan, dan untuk bisa mencapai hal tersebut maka disadari betapa pentingnya peran ulama pada tingkat masyarakat bawah.

2. Pembentukan Masyumi dan Chuo Sangi-in.

Meski telah memberikan status hukum terhadap NU dan Muhammadiyah, namun sebuah wadah yang ditujukan untuk menyatukan kalangan Islam tetap diperlukan oleh Jepang untuk mendukung kepentingan pendudukan dan kampanye perangnya itu. Karenanya pemerintah militer pada 22 November 1943 membentuk wadah federasi Islam yaitu Majelis Syura 'Ala Islam (Masyumi).

Pada susunan kepengurusan juga terjadi perubahan dimana anasir-anasir dalam MIAI tidak menempati posisi kunci dalam Masyumi ini. Sebagai pucuk pimpinan Masyumi, dipercayakan kepada KH. Hasyim Asy'ari dengan para pembantunya berasal dari unsur-unsur NU dan Muhammadiyah seperti KH. Nachrowi, Zainul Arifin, KH. Mukhtar, KH. Wahid Hasyim (unsur NU) dan KH. Mas Mansyur, KH. Farid Ma'ruf, KH. Mukti, dan Kartosudarmo (unsur Muhammadiyah).⁴⁷ Untuk lebih mengikat Masyumi dengan pemerintah militer, maka dalam kedudukan sebagai ketua Masyumi, KH. Hasyim Asy'ari juga diangkat sebagai penasihat dalam pemerintah militer (Gunseikan). Dengan kenyataan seperti ini maka J. Benda melihat bahwa eksistensi dan keberadaan Masyumi sebenarnya telah menjadi bagian dari pemerintahan itu sendiri.⁴⁸ Namun terlepas dari anggapan seperti itu, sudah cukup jelas bahwa dengan fenomena berdirinya Masyumi, telah memberi sebuah petunjuk mengenai semakin menguatnya kekuatan daya tawar kalangan Islam terutama NU dan Muhammadiyah, setelah sekian lama mereka diposisikan sebagai "kalah tempat" dengan kalangan Islam politik/modernis.

3. Pelatihan Ulama dan Barisan Hizbullah

Meski pada masa-masa awal pendudukan Jepang belum terlalu besar mengharapakan dukungan dan peran serta kalangan ulama dan kyai pedesaan untuk mendukung kampanye perangnya, namun Jepang sangat sadar akan pentingnya kedudukan dan fungsi para pemimpin

agama lokal tersebut di hadapan masyarakat biasa. Mereka ini (para kyai dan ulama) yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk mendukung kampanye peran dan rencana-rencana Jepang terhadap Indonesia dengan mengambil peran sebagai propagandis dan juru penerang dalam mengkomunikasikan kepentingan Jepang terhadap masyarakat. Namun demikian materi itu sebenarnya tidak baku alias bisa berubah-ubah dalam setiap even pelatihan. Materi yang disebutkan di atas adalah materi yang diberikan ketika Shumubu masih di bawah kendali Kolonel Horie. Ketika badan itu berada di bawah KH. Hasyim Asy'ari, maka mulai terjadi perubahan penyampaian materi dalam program latihan itu. Sebagai contoh, dalam penyelenggaraan latihan bulan November 1944, materi "Perang Asia Timur Raya/Perang Pasifik" diadukan dan diganti dengan materi tentang "Pembelaan Tanah Air". Demikian untuk materi "Sejarah Jepang" juga diganti dengan "Sejarah Jawa".

Pada kelanjutannya sikap Jepang yang mulai condong kepada kalangan Islam juga mengandung konsekuensi dengan munculnya aspirasi untuk membentuk kesatuan yang sama dalam lingkup Islam. Bagi kalangan Islam, tumbuh kesadaran bahwa mereka juga memiliki potensi seperti halnya dengan PETA, terlebih selama pendidikan dan pelatihan perwira PETA itu terdapat cukup banyak kyai dan pemuka Islam yang ikut terlibat di dalamnya.⁴⁹ Setelah menunggu hampir kurang lebih setahun, pada 14 Oktober 1944 Jepang setuju untuk membentuk satuan semi militer Islam. Namun sekali lagi mereka lamban merealisasikannya karena baru pada 8 Desember 1944 Jepang secara resmi mengumumkan pembentukannya.⁵⁰ Selanjutnya pada 15 Desember 1944 satuan sukarela Islam yang diresmikan itu diberi nama "Hizbullah" yang berarti "Tentara Allah".⁵¹

Lambatnya sikap Jepang ini dimungkinkan dengan teguhnya sikap kalangan Islam terkait dengan kebijakan untuk melibatkan potensi pribumi dalam upaya menghadapi potensi serangan militer Sekutu. Sebelumnya Jepang melalui A. Hamid Ono, seorang perwira penghubung antara Jepang dan Islam, telah meminta KH. Wahid Hasyim membantu dalam pengerahan tenaga muda pesantren untuk masuk ke kesatuan

Heiho. Permintaan ini ditolak, dan oleh KH. Wahid Hasyim diusulkan agar kaum muda pesantren dilatih dalam wadah kemiliteran sukarela tersendiri untuk pertahanan dalam negeri.⁵² Alasan KH. Wahid Hasyim, tujuan untuk pembelaan dalam negeri dipastikan menarik minat kalangan muda Islam jika dibanding dengan meminta kesediaan mereka masuk ke Heiho yang memiliki tugas membantu Jepang di front tempur di luar wilayah Indonesia. Selesai latihan, para peserta kembali ke daerah masing-masing dengan tugas merekrut dan melatih anggota baru di kampung atau pesantren-pesantren. Berpindahnya pelatihan ke desa-desa dan pesantren-pesantren membuat jumlah Hizbullah mencapai taksiran 50.000 anggota.⁵³

Namun demikian meski telah disadari oleh kalangan Islam Indonesia, bahwa posisi mereka selama masa pendudukan diarahkan berada di dalam rencana Jepang, di sisi lain mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk mematangkan diri dalam pergerakan dakwah demi tujuan utama mencapai Kemerdekaan. Sebagaimana dapat dilihat dengan cara yang ditempuh oleh NU, yang juga ditempuh oleh kalangan Nasionalis, meskipun di tingkat permukaan mereka bekerja sama dengan kekuasaan Jepang, namun hal ini tidak lantas membuat Islam tradisional telah “terbeli” oleh pihak Jepang. Mengenai hal ini Choirul Anam menyatakan:

“Akan tetapi di situlah letak ‘rule of the game’ ketika menghadapi lawan (Jepang). Di kalangan NU (pesantren) pada masa itu dikenal istilah “Yahannu” yang artinya adalah sikap dan tindakan ‘dalam’ menghadapi lawan, bukan ‘untuk’ menghadapi lawan.”⁵⁴

Dengan menerapkan pola seperti ini maka kalangan NU berhasil meminimalisir potensi berhadapan dengan kekerasan fasisme Jepang, mereka juga berhasil memanfaatkan kelonggaran dan kesempatan politik yang diberikan untuk menyasati tekanan dan kontrol ketat dari pemerintah militer Jepang. Dengan demikian dalam kasus relasi antara Jepang dengan Islam di Indonesia adalah telah diupayakan oleh Jepang untuk melibatkan Islam untuk mendukung pemerintahan

militer dan kampanye perangnya. Tapi juga harus dicermati juga bahwa pengkondisian ini kemudian memunculkan kondisi susulan dimana kedudukan NU menempati posisi tersendiri di hadapan fasisme Jepang.

Jam'iyah NU tidak mau hanya sekedar menjadi pelengkap statis. Keterlibatan kalangan Islam ini disertai oleh nalar kritis dan strategi yang sengaja menumpang pada gelombang besar mobilisasi yang diciptakan Jepang. Situasi ini yang membedakan dengan pendapat umum Harun Yahya yang menempatkan agama sebagai obyek mati ketika masuk dalam kerangka besar totalitarian-fasisme. Peristiwa ini yang menjadikan NU mampu menempatkan diri pada posisi tersendiri pada masa penjajahan Jepang.

E. NU: dalam Sejarah, dalam Keabadian

Namun satu hal lagi yang menjadi fenomena selama masa penjajahan Jepang terkait dengan peran dan prestise politik yang terjadi, bahwasanya sebuah kekuatan yang pada masa Hindia Belanda lebih memilih meminggirkan diri dan bersikap radikal terhadap serangkaian kebijakan politik asosiasi pemerintah kolonial, yakni kalangan Islam tradisional dalam representasi organisasi NU, mulai tampil dan sanggup menunjukkan kepiawaiannya dalam peran dan prestise politik. Unsur-unsur seperti jumlah massa NU yang besar dan tersebar hingga ke pelosok pedesaan, kharisma para ulama dan kyai, keterikatan batin yang kuat antara massa NU dengan kyai, relasi sosial yang dekat antara pesantren-masyarakat desa, dan karakter kultur perlawanan terhadap anasir-anasir Belanda/Barat, merupakan sesuatu yang membuat pihak Jepang terdorong untuk menempatkan kelompok ini kedalam bagian dari rencana dan kampanye selama Perang Dunia II berlangsung.

Dalam menyikapi keberadaan Jepang ini baik kalangan Nasionalis maupun Islam menghadapi sebuah realita bahwa dalam tahun-tahun pertama perang, Jepang terlalu kuat dan tidak mungkin untuk dilawan sehingga mereka menempuh pola kooperatif.⁵⁵ Menyikapi

masa pendudukan Jepang yang represif sebagai sebuah fase untuk persiapan menuju mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu, dalam pergerakan dakwahnya KH. Wahid Hasyim menggunakan analogi antara serigala (Jepang) dan kancil (kancil).⁵⁶ Dengan kemampuan dan kecerdikan memanfaatkan momentum, maka kancil (Indonesia) akan bisa mengelabui lawannya yang lebih kuat dan ganas, yakni Jepang. Baik kalangan Islam maupun Nasionalis sekuler memiliki keyakinan jalannya perang tidak memiliki alasan bagi Jepang untuk tampil sebagai pemenang.⁵⁷ Dengan demikian masa pendudukan Jepang ini dijadikan sebagai kesempatan untuk mempersiapkan diri menuju upaya mewujudkan Kemerdekaan Indonesia.

Jepang sadar betul dan mencoba memanfaatkan serta menggiring pihak NU untuk tidak ragu-ragu dalam mendukung kepentingan pendudukan dan perangnya itu. Sudah sejak dari semula pihak Jepang mengetahui ada beberapa hal seperti masalah sentimen ideologis dan keterpinggiran kelompok itu di masa Hindia Belanda, akan bisa dimanfaatkan untuk menggiring NU untuk secara utuh memberikan dukungan kepada Jepang. Untuk itu secara umum, terutama pada masa-masa akhir pendudukan, kalangan NU terkesan mendapatkan *privilege* dan prestise politik sebagaimana belum pernah terjadi sebelumnya, misalnya dengan pengangkatan KH. Hasyim Asy'ari sebagai kepala *Shumubu*, pemberian status hukum terhadap NU dan Muhammadiyah, dimasukkannya perwakilan Islam dalam badan Chuo Sangi-in, pelatihan dan rekrutmen Hizbullah, dan sebagainya. Strategi dakwah NU di tingkat permukaan, para pemuka Islam tradisional nampak berada dalam mekanisme kontrol yang dilakukan Jepang itu. Unsur-unsur yang selama ini menjadi identifikasi dari kelompok NU seperti kharisma dan kepemimpinan para kyai, massa santri, pesantren, dan sebagainya sepertinya dimobilisasi untuk mendukung program dan rencana Jepang itu. Tapi dari serangkaian sikap yang ditunjukkan itu tidak lebih, seperti dianalogikan oleh KH. Wahid Hasyim, sebagai cara kancil dalam menghadapi serigala. Dipercayakan Shumubu kepada tokoh NU tidak

lebih sebagai koreksi cara halus terhadap pihak Jepang bahwa mereka telah melakukan tindakan yang kurang berkenan dan tidak tepat, karena baik Kolonel Horie dan Prof. Husein Djayadiningrat bukanlah sosok yang bisa diterima di kalangan Islam mayoritas.

Selain itu sebagian besar tokoh Indonesia, baik Islam dan Nasionalis, telah memiliki keyakinan bahwa perang akan segera berakhir dan Jepang menjadi pihak yang kalah. Karena kesadaran demikian ini, KH. Wahid Hasyim selalu menjaga kontaknya dengan pihak Nasionalis, sebuah cara yang telah dilakukannya dalam forum GAPPI di masa Hindia Belanda.⁵⁸ Dalam internal Islam, KH. Wahid Hasyim dan para tokoh Islam lainnya melakukan optimalisasi peran sosial dan politik Islam dengan memanfaatkan jalur-jalur yang dibentuk Jepang seperti Masyumi, Shumubu, dan hingga Shumuka. Dengan semakin menguatnya peran politik itu maka untuk selanjutnya para tokoh Islam mulai berani mengajukan tuntutan terhadap Jepang, seperti dalam hal janji mengenai kemerdekaan. Tuntutan ini muncul terkait dengan dengan pidato PM Kunaiki Kaiso pada 7 September 1944 yang isinya mengenai janji kemerdekaan bagi Indonesia. Sebagaimana dirasakan kelompok Nasionalis, kalangan Islam ingin melihat sampai sejauh mana janji itu bisa dibuktikan karena dalam pidato itu disebutkan juga dengan nasib dari 50 juta orang Islam Indonesia.

Tidak hanya memunculkan perhatian di dalam negeri, pidato ini juga mengundang perhatian dunia Islam sehingga sampai membuat Ketua Kongres Umat Islam se-Dunia, Syeikh Muhammad al Amin al Husaini, merasa perlu untuk memberi teguran terhadap pejabat duta besar Jepang di Jerman, Oshima, agar serius dengan janji pemerintahnya itu.⁵⁹ Sebagai ketua Masyumi, KH. Wahid Hasyim, mencermati benar perkembangan ini dan ia dalam kapasitas sebagai representasi Islam Indonesia telah menerima surat kawat dari ketua Kongres Umat Islam Dunia itu. Dalam internal Masyumi, surat tersebut dibahas dengan keputusan untuk bersegera mempersiapkan umat Islam dan mempercepat tercapainya kemenangan terakhir serta menolak setiap rintangan yang berpotensi

akan mengurungkan datangnya kemerdekaan. Tindakan seperti jelas semakin menambah beban bagi Jepang karena mereka semakin terdesak dan mengarah pada kekalahan. Upaya untuk mengingatkan Jepang akan janji kemerdekaan itu semakin menguat karena kemudian terjadi kontak intensif dengan kaum Nasionalis untuk bersama-sama menekan pihak Jepang

Dengan munculnya tindakan seperti ini, berarti pula NU telah berhasil memanfaatkan posisi politiknya untuk terus menekan Jepang. Sehubungan dengan semakin terpuruknya pasukan Jepang dalam tahun 1944-1945 maka tidak ada hal lain yang dilakukan Jepang selain melakukan tindakan yang bisa menerbitkan harapan dari pihak Indonesia. Kekuatan politik di Indonesia mulai mendapat dorongan, dan bersamaan dengan keluarnya kebijakan populis terhadap diperbolehkannya pengibaran bendera Merah-Putih di kantor-kantor Jawa Hokokai. Meski secara umum Indonesia belum mendapat kepastian tentang kapan kemerdekaan diberikan, namun Jepang telah didesak untuk melakukan sesuatu yang ditujukan dalam mendorong gerakan nasional di Indonesia.⁶⁰

Dari serangkaian uraian yang ditujukan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan politik Islam NU, maka dapat diberikan ungkapan yang mewakili keadaan yang berlangsung pada saat itu, sebagaimana diungkapkan oleh Greg Fealy,⁶¹ bahwa dengan adanya kebijakan Jepang yang mendekati kelompok Islam, maka hal itu telah menarik NU untuk bergairah terlibat dalam kegiatan politik. Tidak sekedar terlibat, bahwa keadaan itu juga telah memberi pengalaman dan rasa percaya diri bagi mereka sehingga menjadi sosok-sosok yang sanggup memberi bukti dan memiliki kematangan dalam berpolitik. Keadaan dan apa yang mereka perlihatkan juga bisa menjadi bukti, bahwa para tokoh NU sebagai kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dalam arena politik pergerakan di masa Hindia Belanda, terbukti mampu melakukan berbagai pergerakan dakwah dan langkah politik yang cerdas di tengah tekanan upaya mobilisasi dan kontrol ketat dari pemerintah militer Jepang yang fasistik itu.

F. Kesimpulan

Penjajah Jepang pernah menangkap dengan kasar *Hadratussyaiikh* KH. Hasyim Asy'ari, itu adalah fakta sejarah, yang mesti kita kobarkan. Walaupun para peneliti sejarah memberikan paparan bahwa dengan NU, Jepang menunjukkan sikap positifnya. Kebijakan politik Islam Jepang ini berbeda dengan kebijakan Islam Hindia Belanda, di bawah komando Prof. Snouck Hurgronje. Sehingga hal itu menimbulkan simpati dari kalangan NU yang selama ini menjaga jarak dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pendekatan ini dilakukan dalam skema rencana mobilisasi massa dan kampanye Jepang sebelum Perang Dunia II. Hal itu juga berhasil memunculkan sinar harapan tentang suatu tata kehidupan baru dalam semangat kebangkitan bangsa Asia, teritorial yang sekian lama dijajah dan diperkosa oleh kolonialisme Barat.

Jepang mengalihkan harapannya terhadap NU, pihak yang terakhir ini dengan cerdas berhasil memanfaatkan kesempatan dan ruang yang diberikan kepadanya. Konsesi yang didapatkan sebagai konsekuensi dan ketergantungan dari peralihan sikap Jepang ini, dengan cepat dimanfaatkan oleh NU untuk melakukan pergerakan dakwah yang secara permukaan memperlihatkan sikap mendukung kepentingan Jepang. Namun sesungguhnya secara rahasia ditujukan untuk kepentingan bangsa Indonesia yaitu melakukan konsolidasi kekuatan pribumi. Mempersiapkan '*condition of possibilities*', memanfaatkan peluang dan momentum, saat terjadi krisis geopolitik di level internasional, kemudian menempatkannya sesuai porsinya di level nasional. Mewujudkan *nation state of Indonesia*. Inilah siasat dakwah: kancil melawan serigala, yang diterangkan putra tercinta *Hadratussyaiikh* KH. Hasyim Asy'ari.

Dengan ruang dan kesempatan yang diberikan itu juga, NU untuk pertama kalinya mendapatkan peran, ruang, dan kesempatan yang sedemikian luas guna menunjukkan kemampuan siasat dakwah dan pergerakan politiknya dimana keadaan seperti itu menjadi sesuatu yang belum pernah dialami NU pada masa kolonial Hindia Belanda. Dalam hal

ini tokoh-tokoh strategis NU yang membekali dirinya dengan akumulasi pengetahuan, telah berhasil menunjukkan kemampuan, konfidensi dan keberhasilannya dalam melakukan peran strategisnya. Yakni peran kesejarahan NU mendirikan Indonesia. NU mengabdikan untuk negara bangsa dari awal hingga akhir masa.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat; Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta:LP3ES, 1987
- Ahmad, Munawar, *Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis*, Yogyakarta: LKiS, 2010
- Anam, Choirul, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, Surabaya: Bisma Satu, 1999
- Anderson, Benedict, *Imagined Communities; Reflections on the origins and spread of nationalism*, London: Verso, 1983
- Abdul Mun'im DZ, *Piagam Perjuangan Kebangsaan*, t.tp: 2011
- Abdul Fattah, H. Munawwir, *Tradisi Orang-orang NU*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006
- Asy'ari, Hadratussyekh K.H. Hasyim, *Risalah Ahlussunah Wal Jama'ah* (terj. Khoiron Nahdliyyin), Yogyakarta: LKPSM, 1999.
- Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1985
- Baso, Ahmad, *Islam Pasca Kolonial: Perselingkuhan Agama, Kolonialisme dan Liberalisme* Bandung: Mizan, 2005.
- Carlton Clymer Rodee etc., *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Cindy, Adams, *Sukarno; Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, Jakarta: Masagung Corporation, 2000
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1990, cet. v.
- Dirdjosanjoto, Pradjarta, *Memelihara Umat: Kiai Pesantren – Kiai Langgar di Jawa* Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Djajusman, *Hancurnya Angkatan Perang Hindia Belanda (KNIL)*, Bandung:

- Angkasa, 1978
- Fealy, Greg, *Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967*, Yogyakarta: LKis, 1997
- KH. Wahid Hasyim, *Mengapa Saya Memilih NU*, ttp, 2011
- KH Ahmad Siddiq, *Hubungan Agama dan Pancasila*, ttp, 1992
- KH. Mustofa Bisri, *Cermin: Kumpulan Tulisan*, ttp, 2009
- KH. Agus Sunyoto, *Suluk Abdul Jalil Syaikh Siti Jenar Jilid 1-7*, 2006
- _____, *Atlas Walisongo*, ttp, 2013
- KH. Said Aqiel Siradj, *Tasawuf sebagai Etika Sosial*, 2006
- Karim, A. Gaffar, *Metamorfosis; NU dan Politisasi Islam Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 1996
- Kartodirjo, Sartono, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1977
- Kartodirjo, Sartono, *Pemberontakan Petani Banten 1988*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984
- Kurasawa, Aiko, *Mobilisasi dan Kontrol; Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945*, Jakarta: Yayasan Karti Sarana & PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), 1993
- Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama: Biografi KH. Hasyim Asy'ari*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1979
- Madjid, Nurcholish, *Indonesia Kita*, Jakarta: Paramadina, 2008
- Malaka, Tan, *Merdeka 100 %*, Jakarta: Marjin Kiri, 2005
- Marwati Djoenoed Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993

- Muzadi, KH. Abdul Muchith, "NU dalam Perspektif Sejarah & Ajaran," dalam *Refleksi 65 tahun ikut NU*, Surabaya: Penerbit Khalista, 2006
- Mahfudh, KH. Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 2003, cet. 2.
- Muzadi, K.H. A. Muchith, *NU dan Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta: LKPSM, 1994.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1996
- Ojong, PK., *Perang Pasifik*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2004
- Ricklefs, MC., *Sejarah Indonesia Modern 1200-1942*, Jakarta: Serambi, 2005
- Rahardjo, M. Dawam (editor), *Pergulatan Dunia Pesantren*, Jakarta: P3M, 1985.
- Rahmat, M. Imdadun (ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, Jakarta: Lakpesdam, 2002
- Shiraishi, Takashi, *Zaman Bergerak; Radikalisme di Jawa, 1912-1926*, Jakarta: Grafiti, 1997
- Soedjono, Imam, *Yang Berlawanan; Membongkar Tabir Pemalsuan Sejarah PKI*, Yogyakarta: Resist Book, 2006
- Soekarno, *Indonesia Menggugat*, tt: CV. Haji Masagung, 1989
- Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jakarta: Penerbit Amartapura, 1963
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1995
- Suryanegara, Ahmad Mansur, *Api Sejarah 2*, Bandung: Pustaka Salamadi, 2010
- Syafii Maarif, Ahmad, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1995
- SD., Subhan, *Ulama-Ulama Oposan*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000
- Salim, Hairus, dan Muhammad Ridwan (editor), *Kultur Hibrida: Anak Muda NU di Jalur Kultural*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Siddiq, KH. Achmad, *Khitthah Nahdliyyah*, Surabaya: Khalista dan LTN NU Jawa Timur, 2005.

- Sutarto, Ayu, *Menjadi NU, Menjadi Indonesia: Pemikiran KH. Abdul Muchith Muzadi*, Jember: Kompyawisda Jatim, 2005.
- Van Bruinessen, Martin, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, , 1994
- Wild, Colin, & Carey, Peter, *Gelora Api Revolusi, sebuah Antologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia, 1986
- Yahya, Harun, *Menyingkap Tabir Fasisme*, Bandung: Dzikra, 2004
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Zubair, KH. Maemun, "Fiqh itu Luwes". *Pesantren*, no. 2, vol. VII, tahun 1990.
- Zuhri, Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-Orang Pesantren*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001
- _____, *Berangkat dari Pesantren*, Jakarta: Gunung Agung, 1987.

Naskah & Dokumen

- Hasil-hasil Muktamar Ke-29 Nahdlatul Ulama 1-5 Desember 1994 di Pondok Pesantren Cipasung*, Jakarta: Lajnah Ta'lif wan Nasyr, 1996.
- Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-27 Situbondo. 1985*, Semarang: Sumber Barokah, t.t..
- Hasil-hasil Keputusan Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama, Surabaya, 27-30 Juli 2006*. Jakarta: PBNNU, 2006.
- Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Bandar Lampung*, Semarang: LTN-NU dan Sumber Barokah, 1992.
- Ensiklopedi Islam*, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993
- Ensiklopedi Islam Indonesia (IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta)*, Jakarta, Djambatan, 1992

Endnotes

1. Restoraji Meiji adalah serangkaian proses yang berlangsung pada masyarakat Jepang menyangkut seluruh bidang kehidupan yang berhasil mengubah bangsa itu menjadi negara modern. Gerakan ini terjadi setelah Dinasti Meiji berhasil memegang kekuasaan pada tahun 1867. Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 2*, Bandung: Pustaka Salamadani, 2010, h. 21-22
2. Karya ilmiah yang representatif dalam memberi informasi dan uraian tentang hubungan Jepang-Islam secara umum maupun Islam Indonesia dapat dilihat pada Harry J. Benda dengan judul asli *The Crescent and Rising Sun* terbitan NV. Uitgeverij W. van Hoeve, Den Haag, Belanda, kemudian dalam versi bahasa Indonesia menjadi *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1985. Selain itu karya juga Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol, Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan 1942-1945*, Jakarta: Yayasan Karti Sarana & PT. Gramedia Widiasarana Indonesia [Grasind], 1993. Keduanya akan menjadi sumber utama dari penyusunan ini.
3. Karya tulis yang juga menyinggung aktifnya Jepang dalam mengupayakan munculnya empati dari kalangan Islam juga bisa dibaca dalam Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-Orang Pesantren*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2001
4. Secara ekonomi Jepang sebenarnya sudah mampu mencukupi kebutuhan sandang pangan rakyatnya, namun mereka kekurangan dalam penyediaan bahan baku dan sangat tergantung dari impor. Sebagai contoh, 90% pemenuhan minyak Jepang tergantung dari impor, demikian juga komoditas-komoditas lain seperti nikel, biji besi, timah, seng, aluminium, kuningan, dan sebagainya yang hanya tersedia dalam jumlah sedikit di negara ini. Djajusman, *Hancurnya Angkatan Perang Hindia Belanda (KNIL)*, Bandung: Angkasa, 1978, h. 15
5. Hanya dalam jarak waktu 1-2 hari, armada AL Jepang lain juga melakukan serangan terhadap garis pertahanan laut AL Inggris di Asia Tenggara yang dikenal kuat. Pada 10 Desember 1941 itu juga pertahanan laut Inggris di Laut China Selatan dirontokkan AL Jepang. Menurut PK. Ojong, dua peristiwa serangan kilat yang dilakukan Jepang terhadap Pearl Harbor dan

- pertahanan laut Inggris di Laut China Selatan, sebagai satu pukulan memantapkan yang berhasil melenyapkan superioritas kekuatan armada laut dua negara itu di kawasan Pasifik. Lihat PK. Ojong, *Perang Pasifik*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2008, h. 1-2
6. Dikatakan simbolis karena pada bulan-bulan sebelumnya, bulan Januari-Februari 1942, pasukan Jepang berhasil menduduki pulau-pulau di luar Jawa seperti Kalimantan pada pertengahan Januari-Februari 1942. Sumatera direbut Jepang pada pertengahan Februari tahun yang sama. Lihat Marwati Djoenod Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VII* Jakarta: Balai Pustaka, 1993, h. 1-2. Sementara itu Sulawesi, Maluku, dan wilayah-wilayah Indonesia timur lainnya sepenuhnya berada dalam penguasaan AL Jepang dalam kurun Februari-akhir bulan Maret 1942. Lihat Djajusman, *Ibid*, h. 129
 7. Nugroho Notosusanto, *Tentara Peta pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1979, h. 11
 8. Sikap ini muncul tidak secara tiba-tiba, sebagaimana dinyatakan Nugroho Notosusanto, bahwa interaksi antara Indonesia dan Jepang telah berlangsung dalam puluhan tahun sebelum PD II meletus. Interaksi itu terjadi dengan berdasar faktor ekonomi, sosial, budaya, dan pandangan politik bersama terkait dengan merebaknya ideologi Pan-Asia pada permulaan abad ke-20. Uraian tentang sikap pertama Indonesia terhadap Jepang ini dapat dilihat dalam Nugroho Notosusanto, *Ibid*, h. 13-17
 9. Partai Komunis Indonesia (PKI) di Kolonial Hindia Belanda diberangus sebagai akibat dari pemberontakan yang mereka lakukan tahun 1926. Banyak pimpinan partai ini yang ditangkap, dan sebagian kecil lainnya melarikan diri ke luar negeri, sementara anggota lain yang tidak tertangkap melakukan aktivitas politik bawah tanah. MC. Ricklefs, *Ibid*, h. 371-372
 10. Nugroho Notosusanto, *Ibid*, h. 39-40
 11. *Ibid*, h. 42
 12. Keempat tokoh yang dipercaya Jepang untuk menangani kegiatan PUTERA ini kemudian dikenal dengan sebutan "Empat Serangkai". MC. Ricklefs, *Ibid*, h. 475
 13. Nugroho Notosusanto, *Ibid*, h. 43

14. Uraian tentang hal ini diungkapkan Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, Surabaya: Bisma satu, 1999.
15. Djayusman, *Hancurnya Angkatan Perang Hindia Belanda (KNIL)*, Bandung: PT Angkasa, 1978, h. 6
16. Guchi Tanaka adalah jenderal Jepang yang terlibat dalam Perang Jepang-Tiongkok 1894-1895 dan Perang Jepang-Rusia (1905) dan menjadi Perdana Menteri Jepang. Dalam Memori Tanaka itu ia menyatakan tentang rencana penaklukan Jepang terhadap Asia dan dunia dengan menempuh politik darah dan besi atau perang dan penaklukan. *Ibid*, h. 7-8
17. *Ibid*, h. 400
18. Nugroho Notokusanto, *Ibid*, h. 14
19. Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol, Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, Jakarta: Kerja sama Yayasan Karti Sarana dengan PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993, h. 273
20. Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam di Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1985, h. 133
21. *Ibid*, h. 134
22. Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 2*, Bandung: Pustaka Salamadani, 2010, h. 13
23. *Ibid*
24. Harry J. Benda, *Ibid*, h. 139
25. Ahmad Mansur Suryanegara, *Ibid*, h. 13
26. *Ibid*, h. 14
27. Harry J. Benda, *Ibid*, h. 135
28. Perjanjian Lateran adalah perjanjian yang disepakati Benito Mussolini dengan Kardinal Gaspari yang mewakili Paus Pius XI dan Gereja Vatikan yang isinya tentang pemulihan hak-hak gereja. Harun Yahya, *Ibid*, h. 176
29. *Ibid*, h. 181
30. *Ibid*, h. 167

31. Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 2* Bandung: Pustaka Salamadani, 2010, h. 15
32. Harry J. Benda, *Ibid*, h. 142 dan Ahmad Mansur Suryanegara, *Ibid*, h. 15
33. Saikere adalah suatu ritual penghormatan kepada Tenno Haika (Kaisar Jepang) sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan atas statusnya sebagai keturunan Dewa Matahari (*Ameterasu Omikami*) dengan cara membungkukkan badan 90 derajat (seperti gerakan ruku' dalam shalat) menghadap ke arah Ibukota Jepang, Tokyo, yang berlaku skepada seluruh rakyat Indonesia dengan tanpa kecuali. Choirul Anam, *Ibid*, h. 118
34. *Ibid*,h. 119
35. *Ibid*, h. 15-16
36. Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol, Studi tentang Perubahan di Pedesaan Jawa 1942-1945*, Jakarta: Yayasan Kartisarana bekerja sama dengan PT. Gramedia, 1993, h.274
37. Jabatan *Gunseibu* para pejabatnya ditunjuk dari para perwira AD Jepang, sementara wakilnya diambilkan dari kalangan orang Indonesia. *Ibid*, h. 8
38. *Ibid*, h. 281
39. Pemberontakan ini meledak disebabkan motif rasa tidak puas kalangan petani lingkungan Islam tradisional terhadap Jepang yang dengan semena-mena dan kejam dalam meminta beras para petani itu. Kajadian ini dinilai sama dengan kejadian serupa di masa Hindia Belanda tahun 1917 dimana meledaknya ungkapan rasa tidak puas itu dipelopori oleh pemimpin Islam lokal sebagaimana dilakukan KH. Zainal Mustafa di Tasikmalaya itu. Harry J. Benda, *Ibid*H. 195
40. Tentang perlakuan kasar yang dialami oleh KH. Hasyim Asy'ari itu berupa penangkapan, penyiksaan, dan pemenjaraan yang dialaminya dari penjara Jombang dan penjara Mojokerto. Bahkan sosok yang sangat dihormati ini kemudian dipindahkan ke penjara Bubutan di Surabaya ditempatkan bersama dengan para tawanan yang terdiri dari para pasukan Sekutu. Choirul Anam, *Ibid*,h. 120
41. Aiko Kurasawa, *Ibid*,h. 282. Sementara itu Benda menyatakan bahwa Prof. Hussein Djayadiningrat disebutkan sebagai menarik diri dari jabatannya

- itu. Harry J. Benda, *Ibid*, h. 201
42. *Ibid*, h. 202-202
 43. Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-Orang dari Pesantren*, Yogyakarta: LKiS dan Yayasan Saifuddin Zuhri, 2007, h. 268
 44. Aiko Kurasawa, *Ibid*, h. 283
 45. *Ibid*, h. 283-284
 46. Laporan ini berdasar dari Mayor RS. Soerio Santoso, "De Japanese Propaganda en de Islam" (Propaganda Jepang dan Islam). (Nota van het Politiek Bureau, Chief Commanding Officer, Allied Military Administration Civil Affairs Branch, AMACAB), 1 Februari 1946, h. 5 sebagaimana dilansir oleh Kurasawa. *Ibid*, h. 334
 47. Marwati D. Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *Ibid*, h. 26
 48. Harry. J. Benda, *Ibid*, h. 202
 49. Terlibatnya para pemuka Islam dalam Peta sehingga mereka menduduki posisi perwira lebih dikarenakan upaya bujukan yang bersifat pribadi dari Jepang melalui perwira intelnya(Beppam), Abdul Hamid Ono. Disebutkan para pemuka Islam ini masuk ke Peta dengan sikap agak segan meski di dalamnya program ini ada perwira Jepang Muslim seperti A. Hamid Ono dan M. Abdul Mun'im Inada. Sikap ini muncul karena adanya rasa kurang berkenan kalangan Islam terhadap cara hidup orang Jepang yang menyinggung perasaan kaum Muslim seperti mabuk-mabukan dan Seikerei. *Ibid*, h. 82-83
 50. Pengumuman ini bahkan masih kalah waktu dengan diresmikannya barisan sukarela dari kalangan Nasionalis, Barisan Pelopor (Suishintai) yang didirikan pada 1 November 1944, lihat Nugroho Notosusanto,*Ibid*, h. 46. Pengambilan yang "terlambat" demikian Benda menyebut terkait dengan persetujuannya atas dibentuknya pasukan sukarela khusus Islam ini bertepatan dengan perayaan ketiga dari serangan besar-besarnya terhadap Pearl Harbor di tanggal yang sama tiga tahun sebelumnya. Lihat. Harry J. Benda, *Ibid*, h. 215-216
 51. Dalam istilah Jepang, Hizbullah ini bernama *Kaikyo Seinen Teishintai*, Nugroho Notosusanto, *Ibid*, h. 46

52. Ario Helmy, *Ibid*, h. 38
53. Nugroho Notosusanto, *Ibid*, h. 47 dan Ario Helmy, *Ibid*, h. 44
54. Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, Surabaya: Bisma Satu, 1999, h. 122
55. Saifuddin Zuhri, *Ibid*, h. 270-271
56. *Suatu hari, dalam pertengahan tahun 1942, aku mendapat panggilan dari KH. A Wahid Hasyim agar menemui beliau di Jakarta. Berangkatlah aku ke Jakarta dengan penuh tanda Tanya dalam kepalaku, apa maksud panggilan itu. Tetapi aku, telah membayangkan bahwa akan ada tugas baru diserahkan pada pundakku.*

“Aku ingin memberitahukan kepada Saudara bahwa suatu tahap baru dalam perjuangan kita harus kita mulai sekarang.” Demikian kata KH. Wahid Hasyim ketika aku menjumpainya di Hotel Des Indes, sebuah hotel kelas satu di Jakarta. Hotel yang di zaman penjajahan, hanya ditempati oleh pembesar-pembesar Belanda.

“Apa artinya tahap baru dalam perjuangan kita Gus?” kembali aku bertanya. Aku selalu memanggil beliau dengan sebutan Gus. Dikalangan pesantren dan dunia Ulama’ terkenal dengan sebutan Gus Wahid.

“Setan gundul ini,” maksudnya Jepang, “Merasa bahwa peperangan antara mereka dengan sekutu akan memakan waktu lama dan memerlukan kelengkapan perang yang bukan main hebatnya. Setan gundul ini tahu bahwa Ulama’ mempunyai pengaruh besar sekali di kalangan rakyat kita. Sebaliknya, mereka juga mengetahui bahwa rakyat sangat membenci orang-orang yang selama ini menjadi alat yang membantu dengan setia penjajahan Belanda. Jepang kini sedang memikat hati rakyat. Mereka sangat memerlukan dukungan rakyat!”. KH. Wahid Hasyim memulai menjelaskan buah pikirannya.

“Mereka telah membebaskan kita dari penjajahan Belanda, mereka telah mengusir Belanda dari kedudukannya di negeri kita. Ini berarti babakan dalam perjuangan kita telah berakhir. Nah, kini kita memasuki tahapan baru dalam perjuangan, yakni menghadapi Jepang sebagai penjajah baru.”

Aku mulai paham apa yang dimaksud dengan tahapan baru dalam perjuangan. “Bagaimana kita menghadapi Jepang, mereka sangat kuat, mempunyai angkatan perang yang sanggup menaklukkan seluruh daratan

Tiongkok, Manchuria, Indo-China, dan kini menguasai Filipina, Thai, Burma, Malaya dan Indonesia," demikian kataku menyela.

Dengan menyibirkan bibirnya, beliau menjawab." Saudara ingat dongeng-dongeng al-Baidaba tentang cerita dunia binatang, Singa dan Harimau sebagai raja hutan dan gajah yang mempunyai keperkasaan, toh bias dikalahkan oleh kancil, dan kancil masih bias dikalahkan oleh siput-siput yang bersatu!"

"Bagaimana Gus, aku masih belum mengerti dalam hubungannya dengan teori perjuangan!" aku menanya karena sudah tak sabar lagi.

"Kita pakai ini!" sambil menunjuk ke keningnya, "Kita harus memakai otak dan pikiran.Kita bisa menjadi 'kancil' dalam menghadapi segala singa dan serigala. Dan, saya akan mengubah teori al-Baidaba, janganlah kancil bermusuhan dengan siput, tetapi harus bersahabat. Ya, kalau saya sendiri, tentulah tidak akan bisa menjadi kancil yang berhasil mengelabui singa dan serigala. Akan tetapi, kalau kita kaum Ulama' bersatu, insya Allah akan jadi kancil, bahkan lebih dewasa dan lebih dari seekor kancil.

"Dari mana kita harus memulai?"aku bertanya

"Saudara harus tahu, ini perjuangan. Dalam perjuangan bisa berlaku tipu-menipu, istilahnya secara kasar. Musuh menipu kita, dan kita memakai akal, sehingga siapa memeralat siapa. Saudara masih ingat, bukankah dalam al-Qur'an telah difirmankan:

Wa makarru wa makara Allahu wa Allahu khairu al-Makirin, mereka melakukan tipu muslihat, dan Allah Maha Pengatur daya upaya! (KH. Saifuddin Zuhri, Guruku Orang-Orang Pesantren, hal. 269-272)

57. Keyakinan ini selain didasarkan kepada pertimbangan rasionalitas dalam medan pertempuran Perang Dunia II, juga berdasar kepada keyakinan terhadap mitos dari Jayabhaya yang sedemikian populer di kalangan masyarakat Jawa, bahwa sebelum datang zaman kesentosaan yang dipimpin ratu Adil, terlebih dahulu akan muncul zaman yang buruk berupa munculnya masa peralihan yang didominasi oleh orang-orang kerdil dimana mereka hanya berkuasa selama seumur jagung. Orang kerdil itu diidentifikasi sebagai orang Jepang, dan masa seumur jagung itu adalah untuk kurun 3,5 tahun masa pendudukan Jepang yang secara nominal disamakan dengan usia tan-

aman jagung yang 3,5 bulan. Nugroho Notosusanto, *Ibid*,h. 13

58. Choirul Anam, *Ibid*,h. 122
59. Choirul Anam, *Ibid*, h. 125
60. Sikap dari Tentara ke-16 Jepang di Jawa dan Tentara ke-25 di Sumatera ini berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh AL Jepang yang menunjukkan sikap menentang terhadap setiap upaya untuk mendorong dan memajukan nasionalisme di wilayah kekuasaannya. Lihat MC. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: Serambi, 2005, h. 421
61. Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama*, Sejarah NU 1952-1967, Yogyakarta: LKiS, 2007, h. 51